

Memori Reformasi dalam Film Dokumenter “Mosi Tidak Percaya” (2019)

Muhammad Aswan Zanynu

aswan.zanynu@uho.ac.id

Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

Submitted: 04 Mei 2020 **Revised:** 04 Mei 2020 **Accepted:** 20 Mei 2020

Abstrak

Setelah dua dekade berlalu, kata “reformasi” kembali muncul dan digunakan menjadi nama sebuah unjuk rasa mahasiswa pada September 2019. Aksi Reformasi Dikorupsi yang terjadi di hampir semua kota besar di Indonesia ini, kemudian dikemas dalam bentuk film dokumenter berjudul “Mosi Tidak Percaya” (2019) dalam dua episode. Secara kasat mata, di lapangan aksi ini memiliki kemiripan dengan yang pernah terjadi di tahun 1998. Dengan menggunakan metode analisis *framing* dari Entman, penelitian ini bermaksud untuk menemukan memori reformasi yang dibingkai dalam konten film tersebut. Memori dalam konteks media adalah peristiwa/isu di masa lalu yang dikatkan dengan peristiwa/isu aktual yang sedang terjadi. Memori reformasi yang dimaksud di sini adalah segala hal dalam konten film (audio maupun visual) yang disandingkan dengan peristiwa/isu di tahun 1998 saat terjadi aksi mahasiswa yang menuntut adanya reformasi. Temuan menunjukkan bahwa memori ditampilkan secara tersirat dalam orasi, wawancara, dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang diposisikan sebagai penyebab turunnya mahasiswa ke jalan. Mereka digambarkan sebagai martir yang berjuang untuk Indonesia yang lebih demokratis. Relasi memori antara Aksi Reformasi Dikorupsi pada tahun 2019 dan gerakan Reformasi tahun 1998, dituturkan dengan pendekatan reflektif dalam film dokumenter ini. Di satu sisi, pendekatan tersebut berhasil memberi penekanan yang kuat pada Aksi Reformasi Dikorupsi agar tampak menjadi suatu peristiwa yang sangat penting. Namun di sisi lain, tidak adanya penuntun alur cerita (dalam bentuk narator atau teks) menyulitkan munculnya memori secara eksplisit dalam konten film. Dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan publik tentang isu Reformasi 1998, untuk dapat mengungkap simpul memori tersebut dengan Aksi Reformasi Dikorupsi tahun 2019 di film dokumenter ini.

Kata kunci: *film dokumenter, memori media, reformasi*

Reformation’s Memory In Documentary Film “Vote Of No Confidence” (2019)

Abstract

After two decades have passed, the word “reformation” reappeared and was used as the name of a student demonstration in September 2019. The Corrupted Reformation Movement that occurred in almost all major cities in Indonesia was then packaged in the form of a documentary film entitled “Vote of No Confidence” (2019) in two episodes. In plain view, the action field has similarities with those that happened in 1998. By using the Entman's framing analysis method, this study intends to find the reformation memory framed in the film's content. It refers to everything in film's content (audio and visual) that bring back the issue in 1998 when the student action demanded reformation in Indonesia. The findings show that memory is implicitly displayed in speeches, interviews, and demands made by students. The House of Representatives and the Government are positioned as the cause of the demonstration. They were described as martyrs who fought for more democratic Indonesia. The memory relation between the Corrupted Reformation Movement in 2019 and the Reformation movement in 1998, was told by using reflective mode in this documentary. On the one hand, the approach succeeded in giving strong emphasis to the Corrupted Reform Movement as a very important event. But on the other hand, the absence of narrator or text to explain the footage makes it difficult to emerge memory explicitly in film content. It takes public experience and knowledge on the 1998 Reformation issue, to be able to uncover the memory connection with the 2019 Corrupted Reformation Movement in this documentary.

Keywords: *documentary film, media memory, reformation*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 September 2019, perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menyoroti proses pembahasan Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang dinilai tertutup dan tidak melibatkan aspirasi publik. Mereka juga meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut mereka, sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam demokrasi, ranah privat warga negara, dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Pada momen ini, perwakilan mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya mereka kepada DPR. Sebelumnya ketika melakukan demonstrasi di luar gedung DPR, mahasiswa juga meneriakkan slogan “Reformasi Dikorupsi!” (Erdianto, 2019). Bersama slogan-slogan lainnya, ungkapan “Mosi Tidak Percaya” dan “Reformasi Dikorupsi” kemudian menjadi frasa yang dibangun bersama dalam narasi demonstrasi mahasiswa selama bulan September 2019.

Di ranah maya, data yang disampaikan *Drone Emprit Academic* menunjukkan, RKUHP menjadi topik yang mencolok di jejaring sosial mikroblog Twitter sejak tanggal 16 September 2019. Terdapat 782 twit yang muncul. Sehari kemudian jumlahnya naik mencapai 8.108 twit. Topik ini terus memuncak hingga lebih dari 12 ribu twit pada tanggal 21 September 2019 dini hari. Percakapan itu juga antara lain disertai dengan tagar #tundaRKUHP, #MahasiswaBergerak, #TolakRUUKUHP, #rukuhp, dan #ReformasiDikorupsi (Hidayat, 2019).

Pergerakan isu di ranah maya tadi diikuti dengan serangkaian demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada puncak aksi 24 September 2019, jumlah demonstran yang turun ke jalan mencapai 52.645 orang (Dongoran, 2019). Dalam sejumlah berita media, unjuk rasa mahasiswa tersebut diberi nama “Aksi Reformasi Dikorupsi”.

Penamaan ini seperti membangkitkan memori atas momen demonstrasi besar-besaran mahasiswa di tahun 1998 yang mendesak dilakukannya reformasi (yang berakhir dengan turunnya Presiden Soeharto). Bisa jadi karena aksi tersebut memiliki sejumlah kemiripan dengan yang terjadi tahun 2019. Pertama, sebagian besar demonstrasi adalah mahasiswa yang berorasi di depan gedung DPR/MPR. Mereka menyebut gerakan tersebut sebagai “Reformasi Jilid II” dan bentuk dari ekspresi “Mosi Tidak Percaya” kepada DPR. Kedua, unjuk rasa terjadi di hampir semua kota besar Indonesia. Dalam aksi tersebut, 185 demonstran ditangkap, 32 orang menjadi tersangka, dan 2 orang meninggal dunia (Dongoran, 2019). Ketiga, tuntutan mereka berawal dari kekhawatiran akan munculnya sebuah kekuasaan otoriter ala Orde Baru yang menjadikan undang-undang sebagai legitimasi atas banyak praktik penyelewengan.

Koran Tempo edisi 20 September 2019 bahkan menyajikan berita utamanya dengan judul “Menolak Kembali ke Orde Baru”. Revisi Undang-undang KPK atau RUU KPK dinilai akan menguntungkan koruptor. Sementara Rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dipandang berbahaya karena selain ikut

membantu pelemahan pemberantasan korupsi, juga menunjukkan indikasi akan membungkam demokrasi (Putri and Hidayat 2019). Di pasal 604 RKUHP, masa hukuman minimal pelaku korupsi berkurang dari 4 tahun penjara, menjadi 2 tahun.

Ada pula sejumlah pasal yang berkenaan dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintah, hasutan melawan penguasa, serta penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, juga disebut-sebut sebagai pasal-pasal yang dapat membungkam demokrasi. RKUHP juga memuat pasal makar yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers. RKUHP juga masuk jauh sampai ke ranah privat. Di pasal 468 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan kandungan atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Pasal ini dinilai abai terhadap perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.

Selama dua dekade, setelah momen Reformasi tahun 1998, dapat dikatakan tidak ada demonstrasi besar yang dilakukan mahasiswa selain yang terjadi pada September 2019. Pada bulan Mei 2019 memang pernah terjadi unjuk rasa, namun hanya terpusat di Jakarta dan tidak melibatkan mahasiswa. Hanya dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat menjelang hasil pengumuman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Demonstrasi yang diberi nama “Aksi Reformasi Dikorupsi” inilah yang mendapat ruang khusus dalam liputan media konvensional dan media daring (*online*). Selama bulan September 2019, unjuk rasa dan segala

yang berkaitan dengan tuntutan mahasiswa ini menjadi wacana utama media saat itu.

Kemenonjolan dan relevansi isu yang diusung oleh aksi tersebut dengan konteks Indonesia terkini, bisa jadi mendorong *Watchdoc* membuat dua episode film dokumentasi yang diberi judul “Mosi Tidak Percaya”. Episode pertama, “Mosi Tidak Percaya – Part 1”, diunggah pada 26 September 2019. Sementara episode kedua “Mosi Tidak Percaya – Part 2”, diunggah melalui kanal YouTube *Watchdoc* pada tanggal 13 Oktober 2019. *Watchdoc* adalah sebuah media daring yang mengkhususkan diri pada produksi konten digital membuat film dokumenter bertema sosial dan politik. Pengamatan yang dilakukan sampai tanggal 19 April 2020, keduanya film ini menarik perhatian penonton mencapai 853 ribu (*views*). Jumlah tersebut lebih lima setengah kali jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan kanal YouTube *Watchdoc* hanya 152 ribu (*subscribers*).

Isu reformasi dan korupsi pada dasarnya isu yang sangat substansial dalam perjalanan politik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawarata Rakyat (TAP MPR) nomor XI tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi tonggak penanda niat besar seluruh elemen bangsa untuk memerangi dan mengakhiri praktik tersebut. Lebih dari itu, pasca-Soeharto sebenarnya membawa semangat yang menginginkan politik Indonesia bergerak ke arah yang lebih demokratis. Di titik ini, produser, sutradara, dan para pihak yang terlibat dalam produksi film dokumenter dapat memainkan perannya sebagai agen memori. Neiger et al. (2011: 9) menggambarkan agen memori sebagai

pihak yang mengkonstruksi/menyeleksi peristiwa/isu di masa lalu untuk dijalin dengan konteks aktual saat ini. Dengan keluasaan dan kebebasan produksi yang mereka miliki, konten dokumenter dapat memunculkan (kembali) memori publik atas peristiwa 1998 dan memberi penekanan pada arti penting “Aksi Reformasi Dikorupsi” yang terjadi saat ini. Hal yang kemudian menjadi penting untuk ditilik adalah keberadaan atau bentuk pertautan antara memori Reformasi 1998 dengan “Aksi Reformasi Dikorupsi” dalam dua episode film dokumenter “Mosi Tidak Percaya”.

Beberapa penelitian terkait film dokumenter yang memiliki relevansi dengan film dokumenter sudah pernah diadakan di Indonesia. Pertama, dilakukan oleh Farid dan Wibowo (2013) yang membahas persoalan-persoalan Indonesia yang dibingkai melalui film dokumenter model *direct cinema* pada program *Eagle Award Competitions* di Metro TV. Kedua, dilakukan oleh Widiyanto dkk (2015) meneliti film *Senyap* dan menemukan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara film tersebut dengan komunisme. Film ini secara keseluruhan merupakan pengungkapan sejarah kekerasan yang dialami oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketiga, dilakukan oleh Randy dkk (2016) yang mengkaji proses produksi film dokumenter berjudul *Di Balik Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun Tahun 1948*. Kebaruan penelitian ini terletak pada tujuannya untuk menggali aspek memori di dalam film —yang belum dilakukan pada riset film dokumenter sebelumnya.

Konsep memori dalam konteks sosial atau kerap disebut memori kolektif (*collective memory*), pertama kali

dikemukakan oleh oleh Hugo Van Hofmannsthal pada 1902, namun sosiolog asal Prancis Maurice Halbwachs yang secara umum dikenal sebagai orang yang merintis riset tentang memori kolektif pada 1913. Memori berbeda dengan memori kolektif. Memori bersifat personal, sementara memori kolektif lebih bersifat komunal yang merupakan pertemuan atau irisan-irisan dari memori yang sifatnya personal tadi. Memori kolektif dapat digambarkan sebagai rekonstruksi masa lalu dalam perspektif saat ini. Konsep kita atas masa lalu dipengaruhi oleh gambaran mental yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjelaskan keadaan kita saat ini (Halbwachs, 1992: 34). Apa saja yang dihadirkan kembali dari masa lalu oleh suatu kelompok masyarakat, dalam perspektif ini, dapat disebut sebagai memori kolektif.

Media menjadi penting dalam memori kolektif karena menjadi institusi sosial yang memberi artikulasi atas sejumlah tema dari memori kolektif yang dipertukarkan dalam masyarakat. Ini yang oleh Neiger et al. (2011) disebut sebagai memori media. Memori media pada prinsipnya dapat dilihat sebagai upaya media untuk merepresentasikan kembali masa lalu melalui proses seleksi dan konstruksi yang mereka lakukan. Memori media berbeda dengan kegiatan menghadirkan kembali arsip peristiwa/isu di masa lalu. Lebih dari itu, memori media masuk pada ranah menghubungkan dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai penjelasan atau interpretasi atas apa yang terjadi di masa kini. Dengan menggunakan konsep memori kolektif Halbwachs sebagai pijakan konseptual, Neiger et al. (2011: 4–5) tampak ingin menunjukkan bahwa memori media adalah memori

kolektif yang termediasi. Dengan kata lain, memori yang dihadirkan dalam konten media, merupakan bentuk artikulasi dari memori kolektif yang hidup dalam suatu masyarakat. Di sini, media menjadi agen memori (pihak yang menyeleksi/mengkonstruksi memori). Untuk menggambarkan praktik tersebut, teori *Agenda Setting* dapat digunakan untuk menjelaskannya.

Agenda setting secara ringkas disebutkan oleh Griffin et al. (2019: 368) sebagai cara agenda media membentuk agenda publik. Agenda media adalah daftar isu atau aspek yang ditekankan oleh media dalam kurun waktu tertentu. Film dokumentar pada prinsipnya bekerja seperti layaknya berita karena menghadirkan fakta, bukan fiksi. Dari sejumlah fakta yang ada, dibuat daftar isu atau aspek apa saja yang layak mendapatkan titik tekan saat memproduksi film dokumentar. Seperti halnya jurnalis yang menyeleksi dan memberi perhatian khusus pada isu/peristiwa yang memiliki nilai berita di setiap siklus produksinya. Sementara agenda publik adalah isu yang menjadi perhatian publik yang merupakan gabungan atau kesatuan dari agenda personal. Riset agenda setting, seperti yang dikemukakan Rogers (1993: 73), memang digunakan oleh para peneliti untuk menyelidiki arah dari efek media atas perubahan sikap dan perilaku. Namun demikian, bukan berarti teori ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hal yang menjadi agenda media.

Griffin et al. (2019: 369–373) menjabarkan tiga premis utama dari teori *Agenda Setting* yang dicetuskan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Mereka melihat *agenda setting* muncul dalam tiga tingkatan atau cara. Pertama,

media menyampaikan kepada publik sejumlah isu untuk dipikirkan. Kedua, media menunjukkan aspek apa dari isu-isu tersebut yang paling penting. Ketiga, media menjelaskan kepada publik cara sejumlah isu saling berkaitan satu sama lain. Di setiap tingkatan ini, dapat ditemukan hal yang menjadi agenda media. Selain itu, lingkup definisi dari *agenda setting* yang begitu luas, menyebabkan teori ini selalu dikaitkan dengan riset efek. Padahal tidak selalu demikian adanya.

Gerald M. Kosicki (1993: 101) menggambarkan tiga subarena yang menjadi lokus teori dan riset ini kerap digunakan. Ia meminjam istilah Rogers dan Dearing yang menyebut agenda setting pada dasarnya adalah sebuah proses. Pertama, agenda setting dikenal sebagai agenda setting publik. Dalam artikel mereka, McCombs dan Shaw menyebutkan *agenda setting* publik terkait dengan relasi antara konten media dengan isu yang menjadi prioritas bagi publik (*public agenda-setting*). Meski riset tahun 1972 ini dilakukan oleh Departemen Jurnalistik dan Komunikasi Massa, ilmuwan lintas ilmu seperti sosiologi, politik, bahkan psikologi politik juga ikut terlibat dalam riset serupa. Di arena pertama ini, *agenda setting* dilihat sebagai riset efek media. Kedua, arena yang melihat agenda setting terkait dengan kebijakan politik (*policy agenda-setting*). Riset ini dilakukan oleh Rogers dan Dearing tahun 1988. Di sini, studi *agenda setting* memposisikan *agenda setting* kebijakan dalam perspektif politik, mislanya isu yang dibahas oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang terpilih, sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh konten media. Arena ketiga dari

adalah yang terkait dengan *agenda setting* media (*media agenda-setting*) yang melihat konten media terkait dengan cara media mendefinisikan, menyeleksi, dan memberi penekanan pada suatu isu. Riset pada arena ini sudah dilakukan sejak tahun 1983 oleh Lang dan Lang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendudukkan *agenda setting* pada arena ketiga. Di lokus ini, memori dalam konten yang merefleksikan agenda media. Metode yang dipilih adalah metode analisis framing. Weaver (2007) melihat adanya kedekatan antara *agenda setting*, *framing*, dan *priming*. Analisis framing juga memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian dan memudahkan penelitian pada tingkat analisis yang sifatnya konseptual. Ada tiga bagian yang akan menjadi perhatian yaitu 1) isu memori yang dipilih oleh media dalam film dokumenter “Mosi Tidak Percaya”; 2) aspek yang menjadi penekanan untuk menggambarkan pentingnya isu tersebut; 3) relasi antara memori reformasi dan “Aksi Reformasi Dikorupsi” yang terjalin dalam konten film “Mosi Tidak Percaya”.

Kerangka analisis framing yang digunakan serupa dengan yang dikemukakan oleh Robert M. Entman. Menurutnya, esensi dari *framing* terkait dengan ukuran, mengembangkan atau menyusutkan elemen-elemen yang menggambarkan realitas agar terlihat lebih atau kurang menonjol/penting (Entman, 1991: 9). Sedikitnya ada empat kerangka analisis yang digunakan oleh Entman (1991). Pertama, identifikasi penyebab munculnya suatu masalah atau isu. Kedua, penggambaran pihak yang menjadi korban dari masalah atau suatu peristiwa tersebut. Ketiga, label moral yang diberikan media.

Keempat, bentuk atau arah generalisasi yang terkandung dalam konten media yang diteliti.

Di setiap tingkatan agenda media yang termanifestasi dalam konten, penelitian ini memusatkan diri pada memori reformasi yaitu segala hal — baik secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit)— yang bertalian dengan konteks, penyebab, dan peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang menuntut adanya reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film “Mosi Tidak Percaya” menggunakan pendekatan bertutur yang oleh Nichols disebut sebagai mode reflektif yang berupaya “menarik perhatian pada suatu asumsi dan konvensi yang dibangun dalam film” (2010: 31–32). Di dua episode film ini tidak ada narator atau teks yang memandu penonton untuk memaknai jalannya alur cerita. Penonton diajak untuk memaknai realitas yang terjadi melalui rangkaian gambar subjek yang penuh aksi, teks dan poster/spanduk protes, serta audio dari subjek yang muncul atau tidak dimunculkan dalam bingkai film (*mise en scene*). Suara-suara tersebut merupakan pernyataan, orasi, yel-yel, atau penggalan wawancara singkat yang bersumber dari suasana atau atmosfer yang terjadi di lapangan.

“Mosi Tidak Percaya - Part 1” berdurasi 6 menit 22 detik. Episode ini secara umum berkisah tentang demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 di Jakarta. Dari awal, secara verbal maupun visual, tidak ada bagian yang secara langsung terkait dengan memori reformasi. Pada menit 0:04:30, muncul pesan teks bertulis tujuh desakan #ReformasiDikorupsi. Ini

merupakan bentuk tindakan (editing) pascaproduksi, bukan tulisan yang diambil dari gambar atau poster para demonstran. Pesan visual yang secara langsung merujuk pada “reformasi”, baru muncul pada bagian akhir episode di menit 0:06:06. Kamera menyorot satu dinding bertulis “REFORMASI JILID II”, di tepi trotoar jalan yang dilalu beberapa kendaraan malam hari.

Secara kronologi, episode pertama ini membuka alur film dari saat mahasiswa bergerak menuju gedung DPR/MPR di pagi hari. Mahasiswa —yang dipersonifikasikan melalui sejumlah orang yang berbondong-bondong dengan beragam warna jaket almamater— mengendarai mobil terbuka, berjalan kaki, mengacungkan poster dan spanduk, serta bergerak mendobrak pintu masuk gedung DPR/MPR. Orasi mereka yang terangkai menjadi narasi film. Mereka mengajukan mosi tidak percaya kepada DPR/MPR RI dan melalui aksi tersebut mereka ingin membangun alat politik mereka sendiri. Konten suara (audio) yang dapat dimaknai berkaitan dengan memori reformasi adalah pada menit 0:01:42 sampai 0:01:45. Di sini sang orator menyatakan:

Mereka (DPR) menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat, tetapi dalam waktu singkat, mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka, yang menguntungkan kroninya, yang menguntungkan oligarki (Nursyamsi et al., 2019a).

Bagi penonton yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa Reformasi 1998, dalam kalimat ini tampak relasi yang ingin dibangun dalam episode pertama film “Mosi Tidak Percaya”. Protes atas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat itu,

relevan dengan apa yang menjadi substansi orasi tersebut.

Protes yang secara verbal dimunculkan dalam film, tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga ditujukan kepada Presiden. Kembali lagi, bagi yang memiliki pengetahuan atas Aksi 1998, yel-yel yang ditujukan demonstran kepada dua entitas politik tertinggi di Indonesia ini, juga mengisyaratkan relasi memori yang ingin dibangun dalam konten media. Bedanya, di tahun 1998, orasi ditujukan untuk mendesak pemakzulan Presiden Soeharto. Sementara di episode film ini, yel-yel mahasiswa dalam Aksi Reformasi Dikorupsi, memberi label “dungu” pada keduanya.

Akhir film “Mosi Tidak Percaya - Part 1” tersaji dalam bentuk klimaks. Mahasiswa memaksa mendobrak gerbang gedung DPR/MPR, semprotan water cannon dari polisi yang memaksa mahasiswa mundur, hingga tembakan gas air mata. Adegan dramatis ini terus berlansung hingga malam hari. Beberapa mahasiswa yang masih bertahan, terus dihalau polisi dengan tembakan gas air mata. Pada penutup di menit 0:04:35 sampai 0:05:24, tampil satu per satu teks yang menyatakan tujuh desakan aksi #ReformasiDikorupsi:

1. *Menolak 8 RUU dan sahkan 1 RUU*
2. *Batalkan pimpinan KPK*
3. *Tolak TNI-Polri di jabatan sipil*
4. *Hentikan militerisme di Papua dan bebaskan tahanan politik segera*
5. *Hentikan kriminalisasi aktivis*
6. *Hentikan pembakaran hutan, pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya*
7. *Tuntaskan kasus pelanggaran HAM, adili penjahat HAM, pulihkan hak-hak korban (Nursyamsi et al., 2019a).*

Tidak ada penjelasan apa saja delapan Rancangan Undang-undang yang dimaksud, siapa tahanan politik yang ingin dibebaskan, pada kasus mana kriminalisasi aktivis terjadi, pelanggaran HAM apa saja yang diminta pertanggungjawabannya, hingga perusahaan mana yang dimaksudkan oleh desakan tersebut.

Meski demikian, secara substansi desakan ini dapat dikatakan memuat memori tentang semangat reformasi, namun (sekali lagi) ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dengan hal-hal yang pernah terjadi pada masa sebelum 1998. Di era itu, undang-undang menjadi alat legitimasi pelanggaran bahkan kejahatan pemerintah. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jawaban strategis adalah mereka yang memiliki relasi langsung dengan pusat kekuasaan —yang masa itu dikenal dengan istilah “kolusi dan nepotisme”. Praktik kolusi dan nepotisme juga terjadi pada penguasaan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya. Posisi atau jabatan yang diperuntukkan oleh sipil, diduduki oleh militer (khususnya dari Angkatan Darat). Kritik kepada pemerintah dan separatisme, dilawan dengan kriminalisasi dan praktik yang berindikasi dengan sarat pelanggaran HAM.

“Mosi Tidak Percaya - Part 2” durasinya lebih panjang yakni 32 menit 35 detik. Episode ini dibuka dengan menunjukkan kembali bagian dari episode Part 1 untuk mengingatkan penonton. Mulai dari ikrar mahasiswa yang menyiratkan kebulatan tekad mereka membela kebenaran, penggalan orasi seorang perempuan tua yang menginginkan agar DPR (sebagai wakil

rakyat) yang seharusnya datang menemui demonstran (sebagai rakyat yang mereka wakili), yel-yel yang meneriakan kedunguan DPR, hingga bagian akhir dari episode pertama yang memperlihatkan mahasiswa dibubarkan dengan *water cannon* di depan gerbang gedung DPR/MPR.

Dengan durasi sekitar lima kali lebih lama ini episode pertama, “Mosi Tidak Percaya - Part 2” memiliki ruang cukup besar dalam menghimpin rekaman demonstrasi di luar Jakarta seperti Kendari, Yogyakarta, Makassar, Surabaya, Solo, Surakarta, Ambon, Samarinda, Lampung, dan Malang. Ini didukung pula dengan waktu produksi sekitar 17 hari setelah episode pertama terpublikasi. Seolah masih ingin menyambung kejadian pada tanggal 24 September 2019 di Jakarta, potongan gambar (*footage*) mahasiswa yang pingsan, diangkat dengan tangan tangan seadanya, menjadi penanda dimulainya episode ini.

Bukan mahasiswa saja, petani Kendeng juga tampil memegang mikrofon, pada menit 0:01:00 untuk menagih janji Presiden Joko Widodo:

.. apa yang disampaikan pak Jokowi, ayo kita catat betul. Ayo kita catat betul. Jangan sampai mencoba mengkhianati petani. Kendeng ... menjadi bagian bersama-sama yang harus diperjuangkan. ... Kendeng sudah menang di Mahkamah Agung, pak Jokowi memerintahkan untuk dilakukan kajian lingkungan hidup strategis dan selesai dua tahun, tapi sampai sekarang juga belum dilakukan. (Nursyamsi et al., 2019b)

Kehadiran petani Kendeng ini dalam bingkai film (*mise en scene*) tanpa teks atau narasi audio penjelas tentang masalah

yang sesungguhnya sedang mereka alami. Mereka tampil begitu saja untuk merepresentasikan petani yang terabaikan.

Berbeda dengan episode pertama yang menampilkan klimaks unjuk rasa di akhir film, pada episode kedua, ketegangan sudah dimulai dari menit 0:01:46. Bertempat di Kendari pada 26 September 2019, mahasiswa terlihat berlarian setelah terdengar bunyi letusan senjata api. Asap gas air mata memecah kumpulan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan sebuah gedung. (Tidak ada teks yang menjelaskan bahwa lokasi aksi terjadi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara). “*Mahasiswa sekarang ingin dibunuh, bukan ingin diamankan. Ini adalah selongsong peluru, Kawan-kawan. Masih Baru*” (Nursyamsi et al., 2019b). Narasi ini terdengar dengan menampilkan *footage* seorang demonstran yang dipapah, dibawa ke Unit Gawat Darurat. Mahasiswa tadi akhirnya meninggal. Isak tangis sejumlah mahasiswi meluap. Mereka tak kuasa melihat dari foto kawan yang diperlihatkan melalui layar ponsel.

Mereka yang tewas di dalam suatu aksi, akan dikenang sebagai martir. Dua orang mahasiswa di Kendari yakni Immawan Randy (21 tahun) dan Yusuf Kardawi (19 tahun) tewas dalam unjuk rasa tadi. Bukan mereka berdua saja, masih ada tiga lagi korban yang jatuh dari Aksi Reformasi Dikorupsi pada waktu yang berbeda-beda yakni: Bagus Putra (pelajar Jakarta, 15 tahun), Akbar Alamsyah (pelajar Jakarta, 19 tahun), dan Maulana Suryadi (pedagang kali lima juru parkir Tanah Abang, 23 tahun). Infografis tentang mereka ditampilkan pada akhir episode. Penyebab kematian mereka yang penuh indikasi tindak kekerasan,

mengingat publik kepada para korban juga yang berjatuh saat aksi Reformasi tahun 1998. Maulana berpulang dalam keadaan lebam dan darah mengucur dari hidung dan telinga (25 September 2019). Randy tewas diterjang peluru (26 September 2019). Yusuf meninggal karena benturan benda tumpul di kepala (27 September 2019). Terakhir, Akbar meregang nyawa akibat luka lebam dan tempurung kepala pecah (10 Oktober 2019). Seorang pelajar, Bagus Putra meninggal karena kecelakaan saat menuju gedung DPR/MPR (25 September 2019).

Keadaan tersebut membuat publik paham alasan sekelompok mahasiswa dalam dokumenter ini yang justru menjadikan polisi sebagai tujuan aksi mereka. Pada menit 0:07:48 seorang mahasiswa mewakili kawan-kawannya mengatakan: “*Untuk aksi hari ini, di Mapolda Jawa Timur. Kita menuntut Polri harus berubah*” (Nursyamsi et al., 2019b). Di bagian akhir dari film, dengan mengutip data dari Tempo.co, dokumenter ini menuliskan bahwa dalam Aksi Reformasi Dikorupsi, 845 pengunjuk rasa ditangkap, 535 orang dibebaskan (artinya masih terdapat sedikitnya 310 orang yang ditahan). Mengutip VOA Indonesia, film ini juga mencatat dalam kurun waktu 23 – 26 September 2019, sembilan jurnalis menjadi korban kekerasan polisi. Mengutip data dari KontrS, sejak 2014 polisi telah melakukan kekerasan 3.893 kali, 4.695 orang ditangkap, 4.874 orang luka, dan 966 orang meninggal dunia (Nursyamsi et al., 2019b). Tindakan polisi yang ditampilkan tersebut mengingatkan publik pada memori kekerasan yang juga terjadi di tahun 1998 saat demonstrasi Reformasi terjadi. Meski waktu itu, aktor utamanya adalah tentara (militer), namun

keduanya tetap merepresentasikan aparat keamanan.

Bukan polisi saja yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, Presiden Joko Widodo juga diminta harus turun tangan. Seorang mahasiswa di menit 0:12:00 mengemukakan hal berikut:

Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Bapak Presiden Jokowi beserta Dewan Perwakilan Rakyat beserta seluruh jajaran pemerintahan. Kami mohon untuk selesaikan seluruh kasus undang-undang yang ngawur ini. Dan selesaikan kasus militerisme yang ada di Papua. Dan desak agar seluruh tentara dan polisi menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa dan seluruh aktivis pejuang HAM. (Nursyamsi et al., 2019b)

Narasi ini menempatkan tentara dan polisi sebagai alat pemerintah yang tunduk di bawah komando presiden. Pernyataan ini membangkitkan memori atas praktik kekuasaan di masa Orde Baru yang menjadikan aparat keamanan, khususnya militer, sebagai alat represi.

Selain memberi penekanan pada aspek kekerasan yang dilakukan polisi, secara umum dokumenter ini tampak ingin menyampaikan keragaman tuntutan yang dibawa oleh pengunjuk rasa. Kutipan wawancara lebih banyak ditampilkan masing-masing dengan sumber anonim, tanpa nama dan keterangan lain yang bermakna. Film seperti ingin memusatkan perhatian publik pada apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Tema partisipasi kelompok sipil menjadi sorotan dalam kutipan pernyataan seorang mahasiswi di Yogyakarta pada menit 0:06:18.

...kalau Gejayan Memanggil Dua sih ... kami mengharapkan Indonesia menjadi negara yang demokratis. Artinya melibatkan masyarakat sipil secara penuh berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ... perspektif bahwa rakyat itu suaranya sudah diwakili oleh DPR, itu salah. Karena ketika orang-orang duduk di DPR mereka juga ada afiliasi dengan berbagai kepentingan sehingga siapa yang bisa menjamin mereka pro kepada rakyat. (Nursyamsi et al., 2019b)

Skeptisme yang ditunjukkan atas kinerja DPR memuat memori tentang kinerja DPR di masa Orde Baru yang hanya menjadi alat legitimasi dari kehendak Presiden. Meski dalam kasus 2019, sejumlah RUU yang dibahas oleh DPR kala itu merupakan bagian dari sisa sejumlah kesepakatan politik antara presiden dan partai-partai besar pendukung pemerintah yang legislatornya akan berganti setelah Pemilu Legislatif 2019.

Satu dari sekian orasi dan wawancara, ada satu bagian di menit 0:15:05 yang tampak beda karena terdengar lebih menyerupai pembacaan sebuah kutipan puisi pamflet dari seorang mahasiswa:

Jika kau tak lagi berani bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Lawan! (Nursyamsi et al., 2019b)

Publik yang menaruh minat pada gerakan perlawanan Orde Baru, tentu akan mengingat penggalan bait-bait puisi ini milik Wiji Thukul berjudul "Ucapkan Kata-katamu". Dia penyair yang hilang di

sekitar prahara Mei 1998 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan menggunakan elemen *framing* Entman (1991), temuan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam matriks berikut.

**Matriks
Penekanan Elemen *Framing* Film
Dokumenter
“Mosi Tidak Percaya” (2019)**

Elemen Analisis	Penekanan
Penyebab	DPR & Pemerintah yang membahas & mengesahkan RUU bermasalah
Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Langsung: mahasiswa & pelajar (demonstran) • Tak langsung: buruh, petani, nelayan
Label Moral	<ul style="list-style-type: none"> • DPR & pemerintah tidak berpihak kepada rakyat • DPR & pemerintah tidak jujur • DPR & pemerintah melemahkan KPK • DPR & pemerintah melakukan ‘langkah mundur’ • RUU yang disahkan menguntungkan kroni politik & sistem oligarki • Pemerintah melindungi korporasi perusak hutan • Polisi bertindak anarkis menanggapi kritik & aksi protes
Generalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa menjadi martir untuk demokrasi Indonesia • Tidak ada itikad politik yang baik dari DPR dan Pemerintah. • Polisi & Tentara melakukan kekerasan (pelanggaran HAM)

Sumber: Data Primer (2020)

Film dokumenter Mosi Tidak Percaya mendeskripsikan penyebab dari Aksi Reformasi Dikorupsi dipicu oleh tindakan DPR dan Pemerintah yang begitu terburu-buru dan tertutup membahas dan mengesahkan sejumlah RUU bermasalah. Mahasiswa yang tampil sebagai aktor

utama dalam film tersebut, sekaligus korban dalam upaya meluruskan masalah yang juga berdampak kepada buruh, petani dan nelayan. Penilaian moral dinyatakan secara langsung maupun tersirat atas apa yang dilakukan oleh DPR, Pemerintah, dan Polisi hingga membentuk sebuah generasilisasi yang simpulnya dapat ditemukan baik pada episode pertama, maupun kedua film ini.

Isu-isu penting yang menjadi agenda media dan bertalian dengan memori reformasi, lebih ditampilkan dalam bentuk tersirat. Akan lebih mudah dipahami jika dokumenter ini tampil dalam teknik bertutur yang memberi penjelasan (*expository mode*), bukan membiarkan publik menginterperasikan keseluruhan konten berbekal pengetahuan awal yang mereka miliki (*reflexive mode*). Pendekatan *expository* dengan menyertakan narator atau teks penjelas dalam film, akan memudahkan juga dalam memberi penekanan tentang pentingnya setiap bagian yang ditampilkan dalam *footage* dan relasi antarisu di dalamnya. Tokoh perempuan tua yang berorasi di bagian awal kedua episode film dokumenter ini, jika diperkenalkan kepada publik, sudah cukup untuk memberi penekanan dan menarik relasi memori Reformasi (1998) dengan Aksi Reformasi Dikorupsi (2019). Perempuan tersebut terlihat seperti Maria Catarina Sumarsih, ibunda Benardinus Realino Norman Irawan, mahasiswa Atma Jaya yang menjadi korban saat Peristiwa Semanggi 1 tahun 1998. Kekuatan yang sama mungkin akan muncul pula jika tokoh Wiji Tukhul, yang puisi panfletnya dikutip oleh seorang mahasiswa yang berunjuk rasa, diperkenalkan kepada publik. Dia adalah simpul memori yang menghubungkan

perlawanan mahasiswa Mei 1998 (Reformasi) dengan aksi yang terjadi pada September 2019 (Reformasi Dikorupsi).

SIMPULAN

Pertautan memori Reformasi 1998 dengan Aksi Reformasi Dikorupsi dalam film dokumenter “Mosi Tidak Percaya” (2019) lebih bersifat implisit ketimbang eksplisit. Untuk konteks pewarisan memori, teknik bertutur reflektif yang dipilih film ini hanya akan berfungsi baik jika publik memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi atas isu yang didokumentasikan. Bagi mereka yang tidak memiliki keterlibatan yang tinggi, khususnya generasi milenial yang mungkin baru lahir pada tahun 1998, pendekatan eksplanatif yang lebih mampu menjembatani kesenjangan memori yang terbentang dalam kurun waktu lebih dari dua dekade. Oleh karena itu, masih diperlukan sebuah riset audiens untuk mengetahui kemampuan film “Mosi Tidak Percaya” sebagai agen memori dalam menjembatani ingatan atas Aksi Reformasi Dikorupsi tahun 2019 dengan semangat Reformasi tahun 1998.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Mas Eriyanto yang selain meluangkan waktu diskusi yang bermakna, memberi pemahaman, juga rekomendasi bacaan dan referensi tentang framing sebagai teori dan framing sebagai metode penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Dongoran, Hussein Abdi. (2019). ‘Mahasiswa Bergerak’. *Majalah Tempo*, 28 September 2019.
- Putri, Budiarti Utami, and Avit Hidayat. (2019). *RKUHP Mengancam Kebebasan Masyarakat*. *Koran Tempo*, 20 September 2019.
- Erdianto, Kristian. (2019). Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya Ke DPR. *Kompas.Com*. 19 September 2019.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/19/20123761/soal-pengesahan-ruu-kpk-mahasiswa-sampaikan-mosi-tidak-percaya-ke-dpr?page=all>.
- Entman, Robert M. (1991). Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air Incidents 41 (4): 6–27.
- Farid, Novin, and Styo Wibowo. (2013). Framing Persoalan Indonesia Melalui Film Dokumenter Model Direct Cinema (Studi Pada Film-Film Dokumenter Terbaik, Program Eagle Award Competitions Di Metro TV). *Jurnal Humanity* 8 (2).
- Griffin, Em, Andrew M. Ledbetter, and Glenn G. Sparks. (2019). *A First Look at Communication Theory*. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Halbwachs, Maurice. (1992). *On Collective Memory*. New York: Harper Colophon Books.
- Hidayat, Mochamad Wahyu. (2019). Warganet Soroti RKUHP: Pasal Penghinaan Presiden Hingga Korban Perkosaan. *Liputan6.Com*. 20 September 2019.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4067131/warganet-soroti-rkuhp-pasal-penghinaan-presiden-hingga-korban-perkosaan>.
- Kosicki, Gerald M. (1993). Problems and Opportunities in Agenda-Setting

- Research. *Journal of Communication* 43 (2): 100–127.
- Neiger, M., O. Meyers, and E. Zandberg. (2011). *On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age*. Springer.
- Nichols, Bill. (2010). *Introduction to Documentary*. 2nd ed. Bloomington: Indiana University Press.
- Nursyamsi, Aisyah, Anisa Dewi Anggriaeni, and Yulia Adiningsih. (2019a). *Mosi Tidak Percaya - Part 1*. Watchdoc Documentary. <https://www.youtube.com/watch?v=vuCFDxbhQew>.
- . (2019b). *Mosi Tidak Percaya - Part 2*. Watchdoc Documentary. <https://www.youtube.com/watch?v=QOHSxgPIqEE>.
- Randy, Thomas, Obed Bima Wicandara, and Asthararianty. (2016). 'Perancangan Film Dokumenter Di Balik Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948'. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna* 1 (8).
- Rogers, Everett M. (1993). 'The Anatomy of Agenda-Setting Research'. *Journal of Communication* 43 (2): 68–84.
- Weaver, David H. (2007). Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming. *Journal of Communication* 57: 142–147.
- Widianto, Ricky, Desie Warouw, and Johny Senduk. (2015). 'Analisis Semiotika Pada Film Senyap Karya Joshua Oppenheimer'. *Acta Diurna* 4 (4).